1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Cilacap selama periode Juli–September 2026 menunjukkan fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh perubahan pasokan dan permintaan komoditas pangan, serta perkembangan harga pada kelompok transportasi dan barang lainnya. Pada Juli 2026, Kabupaten Cilacap mengalami deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,06%, dengan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,44% dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,21%. Deflasi terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,34%. Penurunan harga terjadi pada komoditas bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan bawang merah dan cabai serta menurunnya permintaan telur ayam ras selama libur sekolah. Di sisi lain, kelompok Transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,14%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin. Kenaikan harga beras, telepon seluler, dan bawang putih juga perlu menjadi perhatian.

Memasuki Agustus 2026, Kabupaten Cilacap mengalami inflasi m-to-m sebesar 0,50%, inflasi y-on-y sebesar 3,08%, dan inflasi y-to-d sebesar 1,71%. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,43%. Komoditas yang mendorong inflasi bulanan antara lain daging ayam ras, cabai rawit, buncis, semangka, dan kacang panjang. Kenaikan harga tersebut berkaitan dengan meningkatnya permintaan serta berkurangnya produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat rendahnya curah hujan dan kemarau yang berkepanjangan. Sementara itu, penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan telur ayam ras menjadi faktor penahan inflasi. Secara tahunan, tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,22%, diikuti kelompok Transportasi sebesar 0,37% dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,46%.

Pada September 2026, inflasi Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 0,29% secara m-to-m, 3,03% secara y-on-y, dan 2,00% secara y-to-d. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau kembali menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,25%. Komoditas yang memberikan tekanan inflasi terbesar meliputi cabai rawit, beras, cabai merah, labu siam/jipang, dan telur ayam ras. Kenaikan harga cabai berkaitan dengan menurunnya produksi akibat kemarau panjang, sedangkan harga beras dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Kenaikan harga telur ayam ras juga perlu diwaspadai seiring tingginya permintaan. Di sisi lain, penurunan harga kacang panjang, terong, ketimun, bawang merah, dan emas perhiasan menahan laju inflasi. Secara tahunan, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,26%, diikuti kelompok Transportasi sebesar 0,40% dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,36%.

Secara keseluruhan, perkembangan harga selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa komoditas pangan masih menjadi faktor utama pembentukan

inflasi di Kabupaten Cilacap. Setelah mengalami deflasi pada Juli, tekanan inflasi meningkat pada Agustus dan berlanjut pada September, terutama akibat kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, beras, dan sejumlah komoditas hortikultura. Selain itu, komoditas bensin masih perlu diperhatikan karena memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan dan berpotensi memengaruhi biaya transportasi serta distribusi barang. Perkembangan harga emas perhiasan juga menjadi perhatian karena memberikan andil cukup besar terhadap inflasi tahunan.

Risiko ke depan yang perlu diwaspadai meliputi potensi berlanjutnya kemarau dan rendahnya curah hujan yang dapat mengganggu produksi serta pasokan cabai dan komoditas hortikultura lainnya, tekanan permintaan terhadap beras dan telur ayam ras, serta kemungkinan gangguan distribusi yang dapat mendorong kenaikan harga pangan. Selain itu, perkembangan harga bensin perlu terus dipantau karena dapat berdampak terhadap biaya angkutan dan distribusi barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkala, penguatan koordinasi dengan produsen dan distributor, kelancaran distribusi antarwilayah, serta pelaksanaan operasi pasar atau gerakan pangan murah apabila diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan risiko inflasi di Kabupaten Cilacap pada periode berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Juli 2026, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap terutama berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas pangan dan kenaikan biaya transportasi. Meskipun secara umum terjadi deflasi sebesar 0,06% (m-to-m), kelompok Transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,14%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin. Di sisi lain, penurunan harga bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras membantu menahan laju inflasi. Namun, kenaikan harga beras dan bawang putih masih perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga komoditas pangan serta kenaikan biaya transportasi masih menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas harga di daerah.

Pada Agustus 2026, permasalahan pengendalian inflasi terutama berasal dari meningkatnya harga komoditas pangan akibat keterbatasan produksi dan tingginya permintaan. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,50% (m-to-m), dengan kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebagai penyumbang utama dengan andil sebesar 0,43%. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam ras, cabai rawit, buncis, semangka, dan kacang panjang. Kondisi kemarau berkepanjangan dan rendahnya curah hujan berdampak terhadap produksi sejumlah komoditas hortikultura, sementara tingginya permintaan daging ayam ras turut meningkatkan tekanan harga. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan pangan, keberlanjutan produksi pertanian, dan keseimbangan antara permintaan dan pasokan masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah.

Pada September 2026, permasalahan pengendalian inflasi masih didominasi oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis, dengan inflasi bulanan sebesar 0,29% (m-to-m). Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,25%, terutama berasal dari kenaikan harga cabai rawit, beras, cabai merah, labu siam/jipang, dan telur ayam ras. Penurunan produksi cabai akibat kemarau panjang serta tingginya permintaan beras menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras turut menambah tekanan harga pangan. Secara tahunan, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,26%, sedangkan kelompok Transportasi memberikan andil sebesar 0,40%, terutama dipengaruhi oleh komoditas bensin. Hal ini menunjukkan bahwa risiko gangguan pasokan pangan akibat kondisi cuaca serta tekanan biaya transportasi dan distribusi masih menjadi permasalahan utama yang perlu dikendalikan.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap selama Juli–September 2026 menunjukkan adanya perubahan tekanan harga, mulai dari kenaikan biaya transportasi pada Juli, meningkatnya harga pangan akibat keterbatasan produksi dan tingginya permintaan pada Agustus, hingga berlanjutnya tekanan harga komoditas pangan pada September. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu difokuskan pada penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan strategis, antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian, penguatan koordinasi dengan produsen dan distributor, serta pemantauan biaya transportasi dan kelancaran distribusi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga di Kabupaten Cilacap pada periode berikutnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 mencakup :

1. Keterjangkauan Harga

a. Monitoring dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kabupaten Cilacap

Monitoring dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan di Pasar Sidodadi yang menjadi pasar pantauan SP2KP setiap hari kerja. Pada Triwulan III tahun 2026, pelaksanaan pemantauan harga telah dilaksanakan sebanyak 64 kali. Data hasil pantauan tersebut diinput di beberapa aplikasi pemantauan harga, seperti SP2KP, dan Sistem Informasi Harga Pangan dan Komoditas Terkini (Sigapmediasi) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

b. Kegiatan Sembako Murah Kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap

Sembako Murah Kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu upaya

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menekan angka inflasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjual sembako bersubsidi kepada masyarakat. Kegiatan Sembako Murah Kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dan bekerja sama dengan Perum BULOG Cabang Banyumas terkait pengadaan komoditasnya. Sembako tersebut dijual dalam bentuk paket yang terdiri dari 3 (tiga) kg beras premium, 1 (satu) liter minyak goring premium, dan gula pasir premium 1 (satu) kg, dan masyarakat dapat melakukan penebusan paket tersebut dengan harga Rp. 5.000,- dengan sasaran masyarakat kurang mampu atau tidak mampu. Pada Triwulan III tahun 2026, paket sembako dialokasikan sebanyak 644 paket dan dilaksanakan di 2 (dua) tempat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tempat	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Paket
1.	Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten	Jumat, 18 September 2026	322
2.	Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten	Jumat, 18 September 2026	322

c. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Maksud dan tujuan : Dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi daerah. Pada triwulan III tahun 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tanggal 5 Juli – 29 September 2026 dengan tema pelaksanaan momen CFD dan Gerakan Pangan Murah untuk Masyarakat (Gapura Mas). Total bahan pangan yang terjual pada triwulan III sebanyak 14.657 kg atau setara Rp 274.459.400,-. Tempat pelaksanaan : Alun – alun Kabupaten Cilacap, Kantor Kecamatan Cilacap Utara, Kantor Kecamatan Cilacap Selatan, Kantor Kecamatan Cilacap Tengah, dan Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Sumber anggaran : APBD Kabupaten Cilacap, APBN Badan Pangan Nasional TA 2026, CSR Bank Indonesia, dan mandiri.

Dari triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2026, total kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan sebanyak 50 kali dengan total bahan pangan yang terjual setara 58.046 kg atau Rp 1.001.965.200,-.

d. Kios Pangan Murah

Maksud dan tujuan : Dilaksanakan dalam rangka mengurangi harga jual toko mitra produsen penyedia bahan pangan dengan cara memfasilitasi biaya distribusi pengiriman bahan pangan dari lokasi penyedia ke lokasi toko mitra. Pada triwulan III tahun 2026, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli - September 2026. Bahan pangan yang terfasilitasi berupa Beras Medium sebanyak 5.400 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp 1.500/1 kg dan Telur Ayam Ras sebanyak 1.800 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp 2.000/1 kg. Kelompok yang terlibat yaitu Pabrik Penggilingan Padi Manunggal Sari Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja dan Kelompok Tani Manunggal Sari Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja. Toko Mitra yang terlibat sebanyak 6 toko yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu : Cipari, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan.

Sumber anggaran : APBD Provinsi Jawa Tengah.

e. Alokasi Bantuan Pangan Periode Juli–September 2026 (BULOG)

Pada Triwulan III Tahun 2026, Perum BULOG mengalokasikan bantuan pangan kepada 275.233 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Alokasi bantuan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026, dengan jumlah alokasi masing-masing sebanyak 2.752.330 per bulan dan total alokasi mencapai 8.256.990 sesuai satuan dalam data. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

f. Realisasi Penyaluran SPHP Kabupaten Cilacap

Pada Triwulan III Tahun 2026, Perum BULOG melaksanakan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Cilacap dengan total realisasi penyaluran sebesar 2.414.875 kg. Realisasi tersebut terdiri dari penyaluran pada bulan Juli sebesar 1.398.745 kg, Agustus sebesar 975.835 kg, dan September sebesar 40.295 kg. Kegiatan ini bertujuan mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasaran serta menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

g. Kegiatan Pemantauan Harga Ikan Di Kabupaten Cilacap

Kegiatan Pemantaun harga ikan di lakukan rutin setiap bulan pada tingkat konsumen. Pengamatan harga ikan di beberapa pedagang di pasar sidodadi dan pasar tanjung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketersedian dan harga ikan yang sering di minati oleh masyarakat untuk di konsumsi. Kegiatan ini bersifat no budgeter, kondisi harga ikan selama triwulan 3 tersaji dalam tabel berikut, selama triwulan 3 harga ikan cenderung stabil.

h. Program Sembako

Jumlah penerima bantuan Bansos sembako di Kabupaten Cilacap berjumlah 131.112 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Bantuan yang sudah tersalurkan pertanggal 03 Oktober 2026 berjumlah 127.305 KPM. Bantuan yang diterima Rp. 200.000/bulan dan disalurkan per 3 bulan.

i. PKH (Program Keluarga Harapan)

Jumlah penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Cilacap berjumlah 61.609 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Bantuan yang sudah tersalurkan pertanggal 03 Oktober 2026 berjumlah 59.326 KPM. Jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda disesuaikan dengan komponen kesehatan, pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang ada dikeluarga KPM tersebut. Untuk Bansos PKH disalurkan per 3 bulan.

j. Kajen (Kartu Jawa Tengah Ngopeni)

KaJeN merupakan singkatan dari Kartu Jawa Tengah Ngopeni, yaitu program bantuan

sosial (Banjamsos) dari pemerintah daerah di Jawa Tengah yang ditujukan untuk masyarakat miskin tidak produktif.

Penerima KaJeN di Kabupaten Cilacap berjumlah 554 KPM. Bantuan berupa uang tunai Rp600.000,- untuk tahap 3 (Juli – September). Penyaluran dilaksanakan melalui Bank Jateng.

k. Car Free Day (CFD)

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap memfasilitasi kegiatan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu pukul 07.00–10.00 WIB di Alun-Alun Kabupaten Cilacap selama Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada tanggal 5, 12, 19, dan 26 Juli; 2, 9, 23, dan 30 Agustus; serta 6, 13, 20, dan 27 September 2026. Pelaksanaan CFD pada tanggal 16 Agustus 2026 diliburkan. Dalam setiap pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 300–400 pedagang dengan jumlah pengunjung rata-rata berkisar antara 1.500–3.000 orang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten adalah Bazar Beras Murah SPHP dan penyediaan Lapak Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Selain itu, CFD juga menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk makanan, minuman, dan produk ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti penampilan kesenian, olahraga masyarakat, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Bazar Beras Murah SPHP dalam kegiatan CFD merupakan salah satu upaya mendukung strategi Keterjangkauan Harga (K1) melalui penyediaan beras dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, keberadaan Lapak Tani menjadi kegiatan pendukung strategi Ketersediaan Pasokan (K2) karena memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh produk pertanian secara langsung. Di sisi lain, penyelenggaraan CFD juga membantu memperluas ruang pemasaran bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat serta menggerakkan perekonomian lokal. Dengan demikian, kegiatan CFD selama Triwulan III Tahun 2026 berkontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui fasilitasi bazar beras SPHP dan Lapak Tani, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

l. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap selaku OPD yang membina pemerintah desa ikut memfasilitasi dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – Dana Desa) yang telah berhasil menyalurkan bantuan langsung tunai kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sampai dengan bulan September Tahun 2026 dengan nominal sebesar Rp. 300.000,00 perbulan per KPM yang bertempat di Balai Desa masing-masing.

Sebanyak 2.791 KPM BLT sudah menerima BLT Dana Desa dari bulan Juni-September atau empat bulan dengan serapan anggaran mencapai Rp. 2.433.200.000,-. Penyaluran

dibagi menjadi beberapa termin yang dimulai pada tanggal 1-10 September 2026. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu warga agar dapat bertahan dalam masa-masa sulit dan memastikan kesejahteraan mereka, terutama bagi yang rentan dan kurang mampu.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Neraca Pangan Wilayah

Neraca Pangan Wilayah merupakan salah satu pendekatan untuk memperkirakan situasi ketersediaan, kebutuhan dan neraca komoditas pangan di suatu daerah selama periode tertentu. Data Neraca Pangan Wilayah ini dapat menjadi acuan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah. Penyusunan neraca ini memiliki payung hukum yang kuat dari UU Pangan hingga Perbadan, serta didukung panduan Kemendagri agar daerah dapat mengalokasikan anggarannya melalui APBD 2026. Pemantauan difokuskan pada 12 komoditas pangan pokok strategis, mulai dari beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging, telur, hingga minyak goreng. Metode perhitungan tahun 2026 kini mengakomodasi variabel baru, yaitu tambahan kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta lonjakan konsumsi saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Pada tanggal 21 - 22 September 2026 telah dilaksanakan kegiatan Capacity Building Penguatan Neraca Pangan Daerah wilayah Jawa di Gumawa Hotel Tower Semarang. Acara ini diinisiasi oleh Bank Indonesia Bersama dengan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas dan dipimpin langsung oleh Bapak Maino Dwi Hartono selaku Direktur Ketersediaan Pangan. Peserta berasal dari 47 Kab/Kota di Wilayah Jawa yang menjadi pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihadiri oleh OPD Pangan dan BI di masing-masing satuan kerja.

b. Papasan Mase (Pantauan Pasar Segar Aman Masyarakat Sehat)

Papasan Mase (Pantauan Pasar Segar Aman Masyarakat Sehat) adalah sebuah program inovasi layanan publik yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kabupaten Cilacap. Program ini dirancang untuk menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasar-pasar tradisional maupun modern di wilayah Kabupaten Cilacap, sehingga masyarakat terhindar dari bahan berbahaya seperti pestisida, formalin, atau bahan kimia berlebih lainnya.

Papasan Mase dilaksanakan setiap bulan dengan mendatangi pengelola pasar dan berkoordinasi mengenai rencana pengambilan sampel. Petugas mengambil sampel pangan segar dari berbagai pedagang secara acak sambil memberikan pembinaan mengenai higienitas. Pengujian sampel skala cepat dilakukan di mobil laboratorium keliling / layanan mobile keamanan pangan. Hasil pengujian disampaikan kepada pedagang. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembinaan dan pencatatan berita acara.

c. Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan di triwulan III merupakan kelanjutan dari triwulan II dengan melakukan gerakan menanam bawang merah TSS (biji) varietas maserati pada kegiatan pengembangan hortikultura APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan total luas tanam 6 Ha yang tersebar di Kecamatan Sampang (1 Ha), Kecamatan Adipala (4 Ha),dan Kecamatan Maos (1 Ha), Selain itu pengembangan bawang merah juga bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DHBCHT) dalam program pembinaan lingkungan sosial peningkatan keterampilan kerja seluas 12 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan dengan menggunakan bawang merah TSS varietas lokananta.

d. Pengembangan kawasan Cabe Rawit

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pengembangan Hortikultura yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 melaksanakan pengembangan kawasan cabai rawit seluas 20 Ha, Selain itu terdapat kegiatan pengembangan Kawasan cabai yang bersumber dari APBN Ta 2026 seluas 10 Ha dan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) seluas 6 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan. Pengembangan kawasan ini diharapkan meningkatkan produksi cabai rawit secara berkelanjutan, ketersediaan pasokan sepanjang tahun dapat terjaga, serta mampu mendukung upaya pengendalian inflasi daerah khususnya di Kabupaten Cilacap.

e. Panen Bawang Merah

Kegiatan panen bawang merah varietas Tajuk telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Kedawung Jaya, Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap melalui bantuan benih bawang merah APBD Kab Cilacap Tahun Anggaran 2026. Budidaya bawang merah dilaksanakan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan menggunakan benih berupa umbi sebanyak 486,8 kilogram yang ditanam pada bulan Mei triwulan II dan panen di bulan Juli (Triwulan III).

Kegiatan panen bawang merah TSS varietas Maserati telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sri Rejeki, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap melalui kegiatan Pengembangan Hortikultura yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Budidaya bawang merah dilaksanakan pada lahan seluas 2 hektar.

f. Penyaluran Bantuan Benih Padi Gogo APBN Pusat

Pada Triwulan III Tahun 2026, Kabupaten Cilacap memperoleh bantuan benih padi gogo yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat untuk luasan 2.448 hektar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) padi pada lahan non-sawah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lahan pertanian. Peningkatan luas tanam tersebut diharapkan dapat mendorong produksi padi dan menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan beras di Kabupaten Cilacap.

g. Kegiatan Mandiri Benih

Pada Triwulan III Tahun 2026, Kabupaten Cilacap memperoleh alokasi kegiatan mandiri benih sebanyak 1 unit. Kegiatan ini bertujuan mendorong penumbuhan dan pengembangan produsen benih secara mandiri di tingkat lokal (in situ), sehingga ketersediaan benih bermutu dapat lebih terjamin dan mudah dijangkau oleh petani. Pengembangan sumber benih lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah serta mendukung keberlanjutan produksi tanaman pangan.

h. Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat koordinasi lintas stakeholder pada tanggal 2 September 2026 bertempat di Ruang Jalabhumi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini bertujuan menyinergikan peran dan langkah para pemangku kepentingan dalam mempercepat peningkatan luas tambah tanam, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, serta penyediaan sarana produksi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi padi dan menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan pangan daerah.

i. Penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida APBN Pusat

Pada Triwulan III Tahun 2026, Kabupaten Cilacap memperoleh bantuan benih jagung hibrida yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dengan alokasi untuk luasan 145 hektar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) dan produksi jagung di Kabupaten Cilacap. Peningkatan produksi jagung diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku pakan ternak, sehingga dapat membantu menekan biaya produksi peternakan dan mendukung stabilitas harga komoditas telur ayam ras serta daging ayam ras.

j. Kegiatan Pelayanan Pemberian Rekomendasi BBM bagi Nelayan

Kegiatan pemberian rekom bbm di lakukan Dinas Perikanan Kab. Cilacap bertujuan untuk membantu pemilik kapal dalam memperoloh BBM bersubsidi. Terpenuhinya BBM bersubsidi dapat mendukung ketersedian ikan hasil tangkapan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kab. Cilacap. Selama periode triwuan 3 tahun 2026 total Rekomendasi BBM untuk Penerbitan Baru jenis solar yang sudah di terbitkan 623 pemilik kapal dan untuk jenis pertalite 601 pemilik kapal, sedangkan untuk Perpanjangan Terbit jenis solar sebanyak 753 pemilik kapal dan jenis pertalite 953 pemilik kapal.

k. Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri Tempe Desa Jenang, Kecamatan Majenang

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri Potensial pada Sentra Industri Tempe di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, pada tanggal 9–10 Juli 2026,

bertempat di Balai Desa Jenang. Kegiatan yang diikuti oleh 25 pelaku industri tempe tersebut menghadirkan narasumber dari Forum Tempe Indonesia dan pelaku usaha. Materi yang diberikan meliputi pengembangan usaha tempe, peningkatan kualitas produk dan pengemasan, strategi pemasaran, serta diversifikasi olahan tempe, antara lain keripik tempe dan nugget tempe. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan tersebut, diharapkan pelaku industri tempe mampu meningkatkan kualitas dan mengembangkan variasi produk olahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta memperluas jangkauan pemasaran. Pengembangan sentra industri tempe ini menjadi salah satu upaya pendukung dalam memperkuat kapasitas industri pangan lokal dan menjaga keberlanjutan usaha, yang secara tidak langsung dapat mendukung ketersediaan produk pangan olahan di daerah.

l. Pendampingan dan Pengembangan Usaha BUM Desa Arja Jaya Abadi Desa Tinggarjaya

Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi desa dan pengembangan potensi usaha lokal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan pendampingan BUM Desa Arja Jaya Abadi di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, pada tanggal 16 Juli 2026.

BUM Desa Arja Jaya Abadi memiliki beberapa unit usaha, antara lain jasa pemasangan internet, pertanian, budidaya ikan nila bioflok, dan layanan BRILink. Selain itu, BUM Desa merencanakan pengembangan usaha melalui pembangunan greenhouse melon organik, pengembangan BUM Desa Mart, serta penguatan pemasaran hasil budidaya ikan nila melalui peluang kerja sama dengan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada tahun 2026, BUM Desa memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar Rp20.000.000 yang direncanakan untuk pengembangan usaha greenhouse melon organik. Dispermades juga memberikan pendampingan dalam penyusunan proposal pengembangan usaha dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Kegiatan tersebut berpotensi mendukung strategi ketersediaan pasokan melalui pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan jaringan pemasaran produk lokal. Penguatan kapasitas BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi desa serta mendukung penyediaan komoditas pangan bagi masyarakat. Namun demikian, kontribusinya terhadap pengendalian inflasi masih bersifat tidak langsung dan memerlukan pengembangan usaha lebih lanjut agar berdampak pada peningkatan pasokan pangan daerah.

m. Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Cilacap dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan Pangan

Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Komisi Irigasi Kabupaten

Cilacap melaksanakan Sidang Komisi Irigasi Ke-3 pada tanggal 10 September 2026. Kegiatan tersebut membahas kondisi cuaca dan iklim, penyusunan rencana jadwal pola dan tata tanam tahun 2026/2027, serta pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan informasi kondisi iklim, Kabupaten Cilacap menghadapi potensi kekeringan dengan prakiraan curah hujan bulan September hingga November 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah dan sifat hujan di bawah normal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan pola tanam untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian, khususnya komoditas padi.

Melalui sidang tersebut dilakukan koordinasi penyusunan rencana pola dan tata tanam pada Daerah Irigasi Serayu, Manganti, serta daerah irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten. Penentuan pola tanam disesuaikan dengan ketersediaan air, yaitu pola Padi–Padi–Padi atau Padi–Padi–Palawija untuk wilayah dengan kecukupan air, serta penyesuaian pola tanam bagi wilayah yang memiliki keterbatasan air.

Selain itu, dibahas kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, antara lain pada Daerah Irigasi Manganti, Cikawung, dan Serayu, serta pembangunan embung dan perbaikan infrastruktur pendukung pengairan. Sidang juga merekomendasikan percepatan pembukaan pintu air pada Daerah Irigasi Serayu tanggal 11 September 2026 guna mendukung percepatan tanam Musim Tanam I.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mendukung strategi ketersediaan pasokan melalui penguatan koordinasi pengelolaan air irigasi, penyesuaian pola tanam terhadap kondisi iklim, serta dukungan terhadap keberlanjutan produksi padi. Dengan pengelolaan irigasi dan perencanaan tanam yang tepat, diharapkan produktivitas pertanian dapat terjaga sehingga mendukung ketersediaan pasokan beras dan stabilitas harga pangan di Kabupaten Cilacap.

n. Pelatihan Blending Tembakau melalui DBHCHT

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Blending Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 22–24 Juli 2026, bertempat di Hotel Azana Asia Cilacap. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari pelaku industri hasil tembakau di Kabupaten Cilacap. Pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Materi pelatihan meliputi pengenalan karakteristik berbagai jenis tembakau, teknik pencampuran atau blending, peningkatan konsistensi dan kualitas produk, serta wawasan mengenai kebijakan industri, DBHCHT, kewirausahaan, motivasi kerja, dan budaya kerja. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Cilacap yang bersumber dari DBHCHT.

Pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pelaku industri hasil tembakau dalam menghasilkan produk yang

berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kualitas produk tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri hasil tembakau serta mendukung keberlanjutan usaha dan perekonomian masyarakat.

o. Pelatihan Pelintingan Rokok PT Golden Deal Indonesia

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif melalui Pelatihan Pelintingan Rokok pada PT Golden Deal Indonesia tanggal 26–28 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 40 orang buruh pelinting rokok PT Golden Deal Indonesia ini dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung mengenai proses pelintingan rokok, mulai dari pengenalan alat linting, teknik penyusunan kertas papir, pembuatan lem perekat, hingga proses pelintingan tembakau. Selain itu, peserta juga memperoleh materi mengenai kebijakan industri, program DBHCHT, budaya kerja, serta ketentuan di bidang cukai. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Cilacap yang bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2026.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja industri hasil tembakau dapat meningkat sehingga proses produksi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi tenaga kerja ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi, memperkuat keberlanjutan usaha, serta membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

p. Pengembangan IKM Sentra Anyaman Pandan Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Kegiatan Pengembangan IKM dalam Memperkuat Sentra-Sentra Industri pada Sentra IKM Anyaman Pandan di Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, pada tanggal 23–24 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pelaku industri anyaman pandan dengan materi pembinaan dan praktik mengenai teknik pewarnaan serat pandan serta diversifikasi motif dan produk anyaman. Narasumber berasal dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Industri Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Selain pelatihan, kegiatan ini juga disertai penyerahan bantuan peralatan berupa 2 buah panci berdiameter 40 cm dan 30 buah pisau. Pelaksanaan kegiatan dibiayai melalui APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Kegiatan pengembangan sentra IKM anyaman pandan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menghasilkan produk dengan kualitas, variasi motif, dan nilai jual yang lebih baik. Melalui peningkatan kemampuan produksi, diversifikasi produk, serta penguatan pemasaran, pelaku IKM diharapkan mampu memperluas peluang usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

3. Kelancaran Distribusi

a. Renovasi Pasar

Renovasi pasar di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaksanaan renovasi pasar dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Renovasi pasar menjadi bagian dari upaya jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Daerah dalam memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan serta barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2026, telah dilaksanakan 2 renovasi di Pasar Sampang dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dan Pasar Karangputat dengan anggaran Rp. 100.000.000,-.

b. Fasilitasi Distribusi Pangan

Maksud dan tujuan : Dilaksanakan dalam rangka intervensi ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan cara memotong rantai pasok distribusi dan memfasilitasi biaya yang dikeluarkan oleh penyedia bahan pangan sebelum didistribusikan ke penjual. Selama triwulan III tahun 2026, kegiatan fasilitasi distribusi pangan telah dilaksanakan pada bulan Juli – September 2026. Komoditas pangan yang didistribusikan yaitu Beras Medium sebanyak 5.200 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp.1.400/1 kg (untuk biaya tenaga kerja : giling, sortasi, kemas, bongkar, muat, dan transportasi). Pendistribusian beras fasilitasi distribusi pangan dialokasikan untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Car Free Day (CFD) Alun – alun Kabupaten Cilacap dan toko mitra gapoktan, yaitu Toko Do’a Ibu, Toko Baidoh, Toko Bu Titi, dan Toko Bu Jazman. Gapoktan yang terlibat antara lain : Gapoktan Rejamulya Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja dan Gapoktan Margo Dadi Maju Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan.

Sumber anggaran : APBD Kabupaten Cilacap

c. Rekomendasi BBM JBT/JBKP

Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara tepat sasaran dan tepat volume kepada konsumen pengguna, khususnya di sektor transportasi. Penerima manfaat meliputi moda transportasi air yang menggunakan motor tempel, baik untuk kepentingan angkutan umum maupun perorangan. Rekomendasi BBM ini berlaku selama tiga bulan sejak surat diterbitkan.

Dengan demikian, rekomendasi BBM ini tidak hanya mendukung peningkatan pelayanan transportasi, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan upaya pengendalian inflasi di daerah. Hal ini karena stabilnya harga transportasi dapat memberikan dampak

positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berikut data kebutuhan volume BBM pada Triwulan III (Juli – September) :

d. Penanganan Long Segment Jl. Ky. M. Syuhud Majenang (DAK Fisik)

DPUPR Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment Jalan Ky. M. Syuhud di Kecamatan Majenang melalui pemeliharaan berkala, peningkatan, dan rekonstruksi jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.363.425.000 dengan capaian fisik sebesar 100 persen dan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan dengan estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 2,211 km.

Peningkatan ruas Jalan Ky. M. Syuhud memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan kelancaran akses transportasi di Kecamatan Majenang. Ruas jalan ini mendukung akses menuju ibu kota Kecamatan Majenang, fasilitas pelayanan publik RSUD Majenang, serta fasilitas pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain itu, ruas jalan tersebut terhubung langsung atau mendukung konektivitas dengan Jalan Nasional ruas Batas Provinsi Jawa Barat–Karangpucung (Batas Kabupaten Cilacap/Banyumas). Peningkatan akses jalan ini juga mendukung mobilitas menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kecamatan Majenang dengan komoditas padi serta akses menuju Pasar Majenang sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok.

e. Pembangunan Infrastruktur Desa melalui TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026

Dalam rangka mendukung kelancaran akses transportasi dan distribusi barang di wilayah perdesaan, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Kodim 0703/Cilacap melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan perkerasan jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 4 meter, pembangunan talud sepanjang 120 meter, serta pembangunan satu unit jembatan dengan panjang 7,2 meter dan lebar 4 meter. Seluruh sasaran pembangunan fisik dan nonfisik dilaporkan telah selesai 100 persen.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah perdesaan, memperlancar mobilitas masyarakat dan angkutan barang, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah, peningkatan konektivitas infrastruktur berpotensi mendukung kelancaran distribusi barang dan komoditas kebutuhan pokok, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat daerah.

4. Komunikasi Efektif

a. Pemantauan harga tingkat konsumen dan produsen

Pemantauan harga tingkat konsumen dan produsen dilaksanakan oleh Petugas Enumerator Ketahanan Pangan dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Cilacap dan Petugas Panel Harga Pangan dengan sumber anggaran dari APBN Badan Pangan Nasional. Titik pantau yaitu di Pasar Sidodadi dan Pasar Gede Cilacap, peternak ayam, peternak telur, pejagalan daging sapi, dan pedagang ecer di 18 kecamatan. Bahan pangan yang dilakukan pemantauan harga antara lain : Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, Gula Pasir Konsumsi, Minyak Goreng Curah, Jagung peternak, Ikan Kembung, Ikan Tongkol, Ikan Bandeng, Garam Beryodium, Tepung Terigu, Beras SPHP, Daging Sapi Hidup, Ayam Tingkat Peternak, Telur Ayam Tingkat Peternak.

- Data hasil pemantauan petugas Enumerator Ketahanan Pangan sumber anggaran APBD Kabupaten Cilacap dapat dilihat di :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/117nXYqhevV0XAgj7yUrGEpC6gJvCMa4TbTUcaKrLlSY/edit?usp=sharing

- Data hasil pemantauan petugas Enumerator Panel Harga Badan Pangan Nasional sumber anggaran APBN dapat dilihat di :

https://panelharga.badanpangan.go.id/

1. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan bagi Poklahsar Hasil Perikanan dan Sidat Di Kabupaten Cilacap

Kegiatan di laksanakan di 3 Kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu Kecamatan Kedungreja, Patimuan,dan Kecamatan Kampunglaut dengan jumlah 15x kegiatan yang di lakukan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Cilacap dengan total anggaran sebesar 125 juta. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan kebutahan apa saja yang dibutuhkan oleh Poklahsar untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan maju sehingga meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

b. Kegiatan Pendampingan Pembudidaya Ikan Tawar dan Air Payau

Kegiatan Pendampingan Pembudidaya Ikan Tawar dan Air Payau di lakukan oleh Dinas Perikanan Kab.Cilacap sebanyak 4 x kegiatan pelatihan pada triwulan 3 tahun 2026, kegiatan ini di laksanakan dengan menggunakan anggaran sumber dana ABPD Kab.Cilacap sebesar 10 juta untuk pelaksanaan 4x kegiatan dengan peserta pelatihan sebanyak 70 pelaku pembudidaya ikan , tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku budidaya di ikan air tawar dan payau bagaimana cara melakukan budidaya yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan produksi

budidaya serta pembudidaya mengetahui apa saja yang harus di siapkan dalam melakukan budidaya ikan.

c. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan pada Pembudidaya Sidat

Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan pada Pembudidaya Sidat di lakukan oleh Dinas Perikanan Kab.Cilacap sebanyak 2 x kegiatan pelatihan pada triwulan 3 tahun 2026, kegiatan ini di laksanakan dengan menggunakan anggaran sumber dana ABPD Kab.Cilacap sebesar 10 juta untuk pelaksanaan 2x kegiatan dengan peserta pelatihan sebanyak 20 pelaku pembudidaya sidat , tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku budidaya sidat bagaimana cara melakukan budidaya yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan produksi budidaya serta pembudidaya mengetahui apa saja yang harus di siapkan dalam melakukan budidaya sidat dan langkah apa saja yang mesti dilakukan dalam mendukung program sidat.

d. Pembinaan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KP- SPAMS)

Kegiatan pembinaan KP-SPAMS merupakan proses bimbingan dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sarana air bersih di perdesaan. Melalui Dispermades Kab. Cilacap telah dilakukan kegiatan pembinaan bagi KP-SPAMS pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 bertempat di Ballroom Hotel Azana Asia Cilacap yang dihadiri oleh para pengelola KP-SPAMS di Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dispermades Kab. Cilacap didampingi oleh Kabid Pengembangan Sumber Daya Permukiman dan Lingkungan Desa. Peserta yang hadir dari pengelola SPAMS dengan narasumber dari Dinas PSDA Kab. Cilacap dan BPJS Ketenagakerjaan.

Materi yang pertama dari Dinas PSDA Kab. Cilacap menyampaikan antara lain instalasi dan perawatan rutin pompa air agar pompa terpelihara secara terencana sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan pada pompanya. Dan materi kedua dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyampaikan perihal program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Pengelola SPAMS) yang meliputi iuran jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja.

Dengan adanya kegiatan pembinaan bagi KP-SPAMS diharapkan dapat memperkuat kelembagaan SPAMS dan menjaga keberlanjutan program seperti Pamsimas agar fasilitas air minum dan sanitasi dapat terus beroperasi dalam jangka panjang.

e. Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan dan Sanitasi Hygiene terhadap Bahan Baku MBG di SPPG

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) berkomitmen penuh menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk tanggung jawab pengawalan mutu pangan di daerah, Dishanpan Kabupaten Cilacap menerjunkan tim teknis untuk

melaksanakan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan dan Sanitasi Hygiene terhadap Bahan Baku MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelaksanaan monitoring pengawasan keamanan pangan dan sanitasi hygiene oleh Dishanpan Kabupaten Cilacap berfokus pada beberapa hal:

- Inspeksi Keamanan Pangan Segar (PSAT): Tim Dishanpan melakukan uji petik (sampling) dan pengujian cepat (rapid test) terhadap bahan baku segar asal tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan beras untuk memastikan bebas dari cemaran bahan kimia berbahaya, pestisida, serta cemaran biologis.
- Pengawasan Kelayakan Sanitasi & Hygiene SPPG: memeriksa kesiapan sarana-prasarana SPPG, mulai dari kebersihan area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan (gudang kering dan cold storage), kelayakan air bersih, hingga pengelolaan limbah agar sesuai dengan standar higiene sanitasi pangan.
- Pemeriksaan Dokumen & Penelusuran Pemasok (Traceability): memastikan bahan baku yang masuk ke SPPG berasal dari pemasok atau produsen lokal yang terdaftar, teridentifikasi rantai pasoknya, serta memenuhi standar registrasi keamanan pangan yang berlaku.
- Pengawasan Penerapan Personal Hygiene Pengelola: memastikan para petugas penerima dan pengolah bahan baku di SPPG menerapkan prosedur keselamatan kerja dan kebersihan perorangan, seperti penggunaan APD lengkap (masker, sarung tangan, apron, penutup kepala) serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Pembinaan dan Evaluasi Kepatuhan: memberikan edukasi teknis serta rekomendasi perbaikan secara langsung kepada pengelola SPPG dan tim dapur apabila ditemukan ketidaksesuaian standar, sekaligus mencatat hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi.

f. Pekan Promosi Cilacap Expo 2026

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas akses pemasaran produk unggulan lokal, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Pekan Promosi Cilacap Expo 2026 yang dijadwalkan pada tanggal 16–19 Juli 2026 di Alun-Alun Cilacap. Kegiatan ini menjadi sarana promosi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pameran pembangunan, gelar produk UMKM dan koperasi, pemasaran digital, serta festival kuliner yang melibatkan perangkat daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pendukung pengendalian inflasi daerah melalui penguatan akses pasar dan pemasaran produk lokal.

g. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap minggu secara virtual.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan inflasi dan harga komoditas kebutuhan pokok, mengevaluasi pelaksanaan langkah konkret pengendalian inflasi, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan risiko kenaikan harga di daerah. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh arahan dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar penguatan langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 secara umum telah dilaksanakan melalui sinergi berbagai perangkat daerah dan instansi terkait dengan mengacu pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Namun demikian, perkembangan inflasi menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menghadapi tantangan, terutama akibat fluktuasi pasokan, perubahan permintaan, dan dampak kondisi cuaca terhadap produksi pertanian.

1. Keterjangkauan Harga. Upaya stabilisasi harga melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 12 kali, penyaluran 644 paket sembako murah, fasilitasi Kios Pangan Murah, serta penyaluran beras SPHP sebanyak 2.414.875 kg telah mendukung akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Program bantuan pangan dan bantuan sosial juga turut mendukung perlindungan daya beli masyarakat. Namun, kenaikan harga daging ayam ras pada Agustus serta cabai rawit, beras, cabai merah, dan telur ayam ras pada September menunjukkan bahwa intervensi stabilisasi harga masih perlu diperkuat, terutama pada komoditas penyumbang inflasi.
2. Ketersediaan Pasokan. Upaya penguatan produksi pangan telah dilakukan melalui pengembangan kawasan bawang merah dan cabai rawit, bantuan benih padi dan jagung, percepatan luas tambah tanam, penguatan Neraca Pangan Wilayah, serta koordinasi pengelolaan irigasi. Kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, kemarau berkepanjangan dan rendahnya curah hujan masih memengaruhi produksi komoditas hortikultura, khususnya cabai, sehingga diperlukan penguatan antisipasi risiko gangguan produksi dan kesinambungan pasokan pangan.
3. Kelancaran Distribusi. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan fasilitasi distribusi pangan, peningkatan infrastruktur jalan, renovasi pasar, serta dukungan akses transportasi dan distribusi barang. Fasilitasi distribusi beras medium sebanyak 5.200 kg merupakan salah satu upaya untuk mengurangi biaya

distribusi dan memperpendek rantai pasok. Meskipun demikian, kelancaran distribusi masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi ketimpangan pasokan antarwilayah serta potensi kenaikan biaya angkutan yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.

4. Komunikasi Efektif. Koordinasi pengendalian inflasi telah dilaksanakan melalui keikutsertaan rutin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri setiap minggu, serta pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Kegiatan tersebut mendukung penyediaan informasi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi. Namun, diperlukan penguatan tindak lanjut hasil koordinasi dan pemanfaatan data harga serta pasokan sebagai dasar penentuan langkah intervensi yang lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 telah mencakup berbagai upaya stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan. Meskipun inflasi bulanan menurun dari 0,50% pada Agustus menjadi 0,29% pada September, tekanan harga pangan masih perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran intervensi, khususnya pada komoditas pangan strategis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok selama Triwulan III Tahun 2026, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilisasi harga pangan melalui peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP, fasilitasi Kios Pangan Murah, serta intervensi pasar secara tepat sasaran, terutama pada komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, pengembangan kawasan hortikultura, percepatan luas tambah tanam, pemanfaatan bantuan benih, serta penguatan pengelolaan irigasi untuk mengantisipasi dampak kemarau dan perubahan kondisi iklim terhadap produksi pangan.
3. Memperkuat pemantauan stok dan kebutuhan pangan strategis melalui optimalisasi Neraca Pangan Wilayah dengan memperhitungkan kebutuhan konsumsi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta potensi peningkatan permintaan pada periode tertentu, sehingga langkah antisipasi kekurangan pasokan dapat dilakukan lebih awal.
4. Meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok melalui penguatan kerja sama dengan produsen, distributor, Perum BULOG, dan daerah pemasok,

serta optimalisasi fasilitasi biaya distribusi pangan guna menjaga pemerataan pasokan dan mengurangi potensi disparitas harga antarwilayah.

5. Memperkuat perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, melalui keberlanjutan program bantuan pangan, bantuan sosial, dan penyediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran.
6. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi melalui penguatan sinergi TPID, perangkat daerah, Bank Indonesia, BPS, Perum BULOG, serta instansi terkait, dengan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan mengoptimalkan pemanfaatan data pemantauan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan terarah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat.